

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KEP. MENTAWAI
2012-2017**

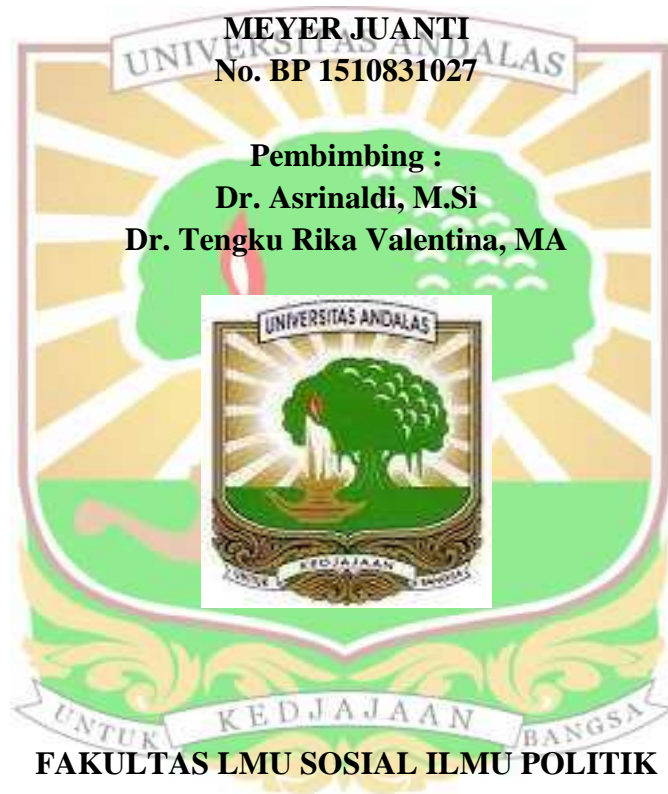
SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memeroleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

oleh :

**MEYER JUANTI
No. BP 1510831027**

**Pembimbing :
Dr. Asrinaldi, M.Si
Dr. Tengku Rika Valentina, MA**



UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

ABSTRAK

MEYER JUANTI, 15109831027. Skripsi S1, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi "Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kep. Mentawai 2012-2017". Dibimbing Oleh: Dr. Asrinaldi M.Si dan Dr. Tengku Rika Valentina, MA. Skripsi ini terdiri dari 113 halaman, dengan 42 referensi: 13 buku, 11 jurnal, 14 sumber elektronik, 4 Constitution.

Dalam dokumen perencanaan RPJMD, pemerintah Kab. Kep. Mentawai sudah mulai melaksanakan pembangunan melalui program dan visi/misi pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati Yudas Sabaggalet, selama kampanye maupun setelah terpilih. Berdasarkan program perencanaan RPJMD yang ditawarkan diantaranya, pembangunan infrastruktur dan SDM. Akan tetapi, sejak awal perencanaan RPJMD dimulai hasilnya belum maksimal. Perencanaan RPJMD yang dilaksanakan lebih fokus pada pembangunan fisik dan dalam pelaksanaan pembangunan masih sering terjadi konflik sengketa tanah/lahan milik masyarakat dengan pemerintah Kab. Kep. Mentawai, serta dalam penyelesaian masalah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan. Muncullah asumsi dari peneliti bahwa ada ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perencanaan RPJMD yang masih dalam posisi pendekatan politik serta lebih cenderung mengarah pada pendekatan *Top-down*. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan persoalan perencanaan RPJMD di Kab. Kep. Mentawai pada Tahun 2012-2016. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang perencanaan RPJMD di Kab. Kep. Mentawai belum sesuai dengan harapan, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Dalam melibatkan partisipasi masyarakat sudah ada program Musrenbang, akan tetapi masih sering terjadi pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah Kab. Kep. Mentawai. Proses perencanaan pembangunan masih dalam posisi pendekatan politik, dikarenakan terdapat visi/misi kepala daerah yang dijadikan sebagai kepentingan politik. Adanya ketimpangan kebijakan perencanaan pembangunan yang cenderung atau lebih mengarah pada pendekatan *Top-down*.

Kata Kunci :, Perencanaan, Pembangunan, RPJMD

ABSTRACT

MEYER JUANTI, 15109831027. Undergraduate Thesis. Department of Politics, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Thesis Title: "Regional Planning District. Kep. Mentawai 2012-2017 ". Guided by: Dr. Asrinaldi M.Sc and Dr. Tengku Rika Valentina, MA. This thesis consists of 114 pages, with 41 references: 13 books, 11 journals, 14 electronic source, 4 Constitution.

In planning documents RPJMD, the government of Kab. Kep. Mentawai has begun to implement development through the program and Development Vision/mission offered by Regent Jude Sabaggalet, during the campaign and after being elected. According to the RPJMD planning program offered, infrastructure and human resources development. However, since the initial planning RPJMD started the results are not maximized. The RPJMD planning implemented more focused on physical development and development in the implementation is still often the conflict of land/land-owned dispute conflicts with the Kab government. Kep. Mentawai, as well as in the resolution of the problem does not correspond to the agreement. The assumption that there is an inequality in implementing the RPJMD planning policy is still in the position of political approaches and is more likely to lead to a Top-down approach. The purpose of this research is to identify and explain the problems of planning RPJMD in Kab. Kep. Mentawai in the year 2012-2016. This research, using qualitative methods of descriptive. The results of this study indicate that it was planning RPJMD in Kab. Kep. Mentawai has not been by following per under the expectations, it can be explained as follows: (1) in involving community participation there is already a program Musrenbang, but still often occurs the pros and cons between the community and government district. Kep. Mentawai. The process of development planning is still in the position of political approach because there is the vision/mission of the regional head that used as political interest. There is an inequality of a development planning policy that tends or more leads to a Top-down approach.

Keywords: Planning, Development, RPJMD